



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	4
F. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi	8
G. Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Laporan Hasil Evaluasi	23

B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	27
C.	Analisis Capaian Kinerja	30
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kerja Tahun ini	31
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	41
3.	Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD/Renstra	52
4.	Analisis Progra/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
D.	Realisasi Anggaran	60
1.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	60
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	63
BAB IV	PENUTUP	65

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 s.d. 2018
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dan 2018 secara berjenjang
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2017 dan 2018
4. Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018
5. Rencana Kerja Tahun 2017 dan 2018
6. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim Tahun Sebelumnya (Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya)

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	9
Tabel 3	Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	14
Tabel 4	Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	16
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	21
Tabel 7	Hasil Evaluasi Tahun 2017 atas LKjIP Tahun 2016	23
Tabel 8	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2017 atas LKjIP Tahun 2016	24
Tabel 9	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017	28

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju “ Good Governance “.

Samarinda, 26 Pebruari 2018

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2017 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2017 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis- analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 6 (enam) sasaran, 14 (empat belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **98,26%**. Sedangkan untuk pencapaian 11 (sebelas) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi keuangan **97,17%**. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 16.045.791.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.945.791.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.188.083.169,00 atau sebesar **(94,65%)**

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Samarinda, 2 Maret 2018

Kepada

Nomor : 700/ 414 /Itprov/III/2018
Lampiran : 1 (satu) buku.
Perihal : Penyampaian Laporan
Kinerja Tahun 2017.

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
Cq. Karo Organisasi
Setda Prov. Kaltim
di -
Samarinda

Memperhatikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 066/327/B.Org tanggal 23 Januari 2018 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersama ini kami disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

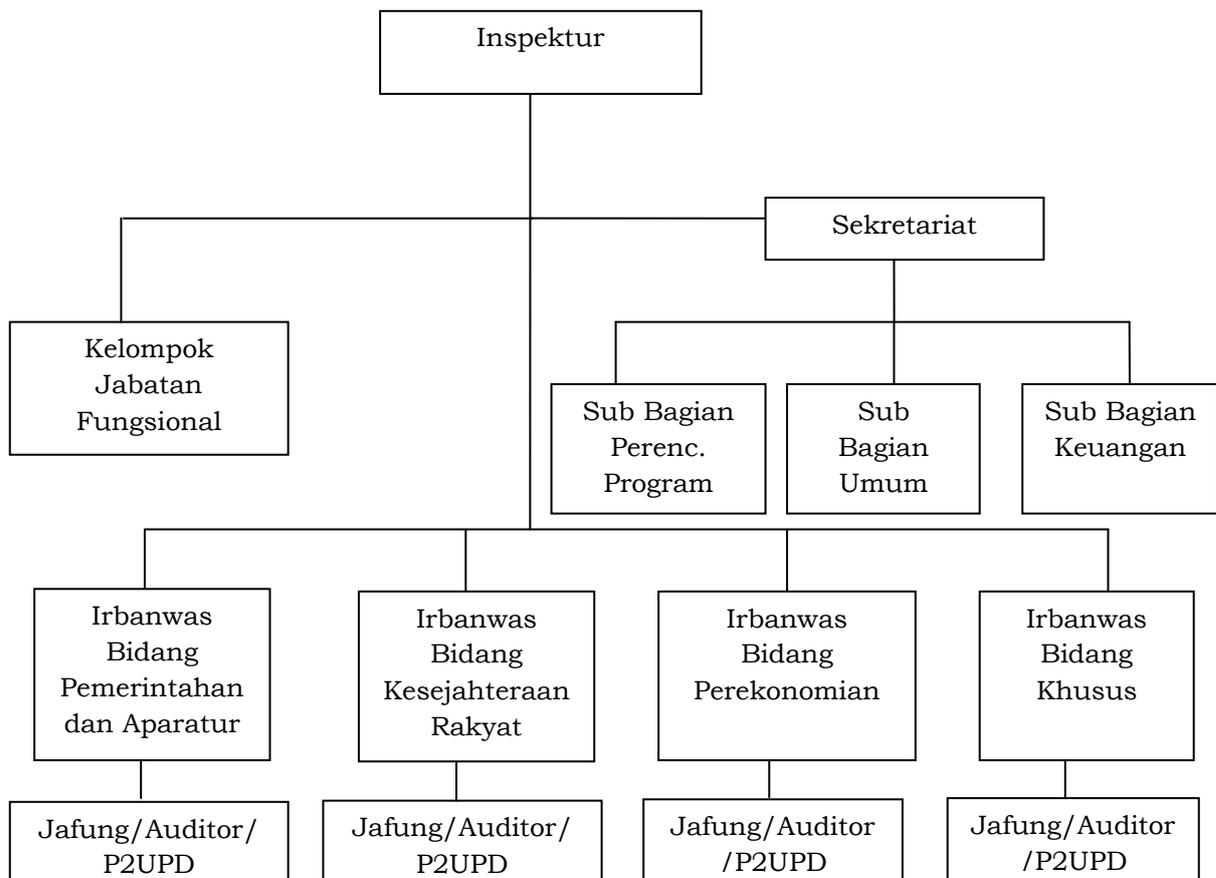
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 87 orang yang terdiri dari 61 orang PNS/ASN dan 26 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 87 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	14	5	31	-	-	3	33	-	-	-	-
Fungsional Umum	10	6	-	9	6	1	-	3	-	12	1	-
Jumlah PNS	38	23	9	45	6	1	7	41	-	12	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	12	-	-	-	-	-	16	2	8	-	-
Jumlah PNS dan PTT	52	35	9	45	6	1	7	57	2	20	1	-

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi, adalah baik aspek strategis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. **Aspek Peraturan Perundang-Undangan**, dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan kuantitas.
3. **Aspek Produk Yang Dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai

dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur yang menjalankan amanah rakyat.

4. **Aspek Metode Pengawasan**, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, pemberian advis/saran dan konsulting dan kontrol internal.
5. **Aspek Sistem Penghargaan (Reward System)**, sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai *shareholder*.
6. **Aspek Budaya Organisasi**, yang meliputi :
 - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi.
 - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.
 - c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta metarial yang ada, dan menghindari

benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

- d. **Independent**, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. **Perbaikan terus menerus**, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.

4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2017 :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	20	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	131	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	1	Set
19.	Kursi Putar	198	Buah
20.	Kursi Tamu	9	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	10	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	34	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	56	Unit
29.	Laptop	39	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Camera	6	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	1	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	LCD	2	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heater	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Recorder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Asphalt Highway	1	Set

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dalam hal ini masih dirasakan kurang. Meskipun demikian dapat membantu dan menunjang dalam tugas-tugas dibidang pengawasan, Dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

1. Visi.

“ MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL “

2. Misi.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka misinya adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**
- b. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan baik sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawasan Eksternal.**
- c. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).**

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan yang dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.
3. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditargetkan, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatnya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
4. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
7. Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran penting dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta IKU yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d. 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Thn 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	40	40	50	60	70	80
			Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	85	85	90	93	95	97
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	54,97	60	65	68	72	75
			Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	52,78	60	65	65	72	75
			Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	28,57	30	50	55	60	80

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Thn 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	80	80	85	90	95	95
			Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	0	5	4	3	2	2
			Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	5	20	18	15	10	10
			SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	0	1	2	3	2	2
		Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	22	32	40	42	45	45
Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	25	25	50	80	95	95
			Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	85	60	75	80	85	95
		Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	80	75	80	85	90	90
Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya Penerapan SPIP	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	1	1	2	2	3	3
			Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	%	10	10	30	50	70	100

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja, maka diperlu adanya Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan
			Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%		Reviu Atas Laporan Keuangan
			Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%		Pemeriksaan Kinerja SKPD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
			Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor		
			Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	Pencegahan dan Pembertarikan KKN	Penanganan Pengaduan Masyarakat
			Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus		
			Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus		Fasilitasi Kegiatan P & P KKN
			SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD		Pengembangan Zona Integritas
		Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	Peningkatan Profesional tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
2.	Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
			Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
3.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah (*)	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	Level %	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda

(*) tidak dilaksanakan, karena keterbatasan anggaran.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2013 s.d. 2018 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targetnya selanjutnya akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018. Berikut ini disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 s.d. 2018.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I	Inspektur
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Menjamin LKJIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKJIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKJIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKJIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	Menjamin LKJIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKJIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKJIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKJIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota	Inspektur dan Irban-Irban serta BPKP Perwakilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani.	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN dilingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN	Inspektur dan Irban-Irban
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur dan Irban-Irban
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Subbagian.
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membandingkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	Inspektur dan Irban-Irban

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur, Irban-Irban dan Sekretaris

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.

Pada tahun anggaran 2017, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2017 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	70
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	72
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	60
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	95
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	10
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	2
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	95
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	85
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1209-Bid-Khusus/IX/Itprov/2017 tanggal 20 September 2017 dengan hasil Evaluasi sebesar **75,35** atau predikat **BB (Sangat Baik)**, sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 7
Hasil Evaluasi Tahun 2017 Atas LKjIP Tahun 2016

No.	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2016	Nilai 2017
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,49	26,36
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,00	19,06
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,24	10,42
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,20	8,17
5.	Capaian Kinerja	20	12,50	11,34
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,61	75,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2017 atas
LKjIP Tahun 2016

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
1.	Perlu membuat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU Unit Kerja/Organisasi/Atasannya yang merupakan breakdown dari IKU atasannya dan menjadi penyebab (memiliki hubungan kasualitas) terwujudnya kinerja utama atasannya.	<p>Pada tahun 2017 sudah dibuat Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk seluruh pegawai mulai dari Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dan diharapkan pada tahun 2018 juga Indikator Kinerja Individu (IKI) juga akan dibuat yang disesuaikan dengan Penetapan Kinerja (PK) yang telah dibuat dan Indikator Kinerja Utama (IKU).</p>	Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2017 seluruh Pegawai di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. (Terlampir)
2.	Perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang yang memiliki indikator kinerja SMART yang formal dan cukup, alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf Operasional (Individu)	Pengukur Kinerja Tahun 2017 untuk setiap Pegawai mulai Eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional Tertentu, Fungsional Umum sudah dibuat berdasarkan Penetapan Kinerja yang ditetapkan.	Dokumen Pengukuran Kinerja Pegawai Tahun 2017 di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. (terlampir)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
3.	<p>Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas supaya selaku dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment</p>	<p>Dalam hal ini diperlu infrastruktur yang jelas dan Tim Independen yang bertugas melakukan penilaian atas capaian kinerja tersebut. Namun selama ini yang dipakai untuk memberikan dasar pemberian reward dan punishment masih didasarkan kepada tingkat kehadiran dan penilaian oleh Atasan Langsung belum didasarkan atas pengukuran kinerja/ capaian kinerja.</p> <p>Pada tahun 2017 sudah ditetapkan Keputusan Inspektur No.700/913.d/Itprov/2017 ttg Pengelolaan SDM Inspektorat Prov. Kaltim</p>	<p>Dokumen SK Inspektur Nomor 700/913.d/ Itprov/ 2017 tgl. 3 Juli 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Bab X Penilaian Kinerja Pasal 27 dan Pasal 28 ayat 1 s.d. 5 (terlampir)</p>
4.	<p>Laoran Kinerja agar dapat menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capai kinerja maupun analisis efisiensi penggunaan sumber daya.</p>	<p>Pada Laporan Kinerja pada Tahun 2017, hal ini akan dimasukkan dalam analisis capaian kinerja yang memuat analaisis capaian, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM.</p>	<p>Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017 (Analisis Capaian Kinerja dalam Bab III. (terlampir)</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
5.	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan.	Informasi Kinerja yang sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan informasi dari capaian kinerja yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung program dan kegiatan, anggaran dan SDM.	Dokumen Laporan Kinerja. (terlampir)
6.	Informasi yang disajikan dapat digunakan dalam : Perbaikan Perencanaan, Menilai dan Memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Untuk Peningkatan dan Penilaian Kinerja	Informasi Kinerja yang disajikan sudah dipergunakan dalam Perbaikan Perencanaan, Menilai dan Memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta dijadikan patokan dalam peningkatan dan penilaian kinerja yang didasarkan pada Renstra, Renja, RKA dan DPA yang telah ditetapkan.	Dokumen Renja, Dokumen Laporan Kinerja. (terlampir).
7.	Dalam evaluasi internal terhadap pemenuhan evaluasi supaya hasil evaluasi internal dapat disampaikan dan dikomunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Kedepan hasil evaluasi internal akan disampaikan dan dikomunikasikan kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan.	Dokumen Hasil Evaluasi Internal atas Penetapan Kinerja. (terlampir)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
8.	Dalam pencapaian sasaran / kinerja organisasi supaya : Selalu berupaya meningkatkan capaian output dan outcome agar pencapaian sasaran/ kinerja organisasi tercapai optimal.	Dalam pencapaian sasaran/kinerja pihak organisasi sudah berupaya meningkatkan capaian baik output maupun outcome. Hal ini didasarkan atas Renstra yang telah dibuat dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja disertai dengan dukung Program dan Kegiatan serta Anggaran dan SDM.	Dokumen Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja. (terlampir)
9.	Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal	Informasi mengenai kinerja sudah didukung dengan data yang andal, hal ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja yang sudah dibuat yang didapat dari data yang andal.	Dokumen Laporan Kinerja. (terlampir).

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar

pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.531/2014 tanggal 08 September 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/2039.a/ltprov/2015 tanggal 15 September 2014.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 98,58 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I					
					Triwulan II	WTP	WTP	100		
					Triwulan III					
					Triwulan IV					
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	70	Triwulan I					
					Triwulan II	70 %	70 %	100		
					Triwulan III					
					Triwulan IV					
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	95	Triwulan I					
					Triwulan II	95 %	94,65 %	99,65		
Triwulan III										
Triwulan IV										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	72	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	72	61,89	85,96
					Triwulan IV			
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72	Triwulan I			
					Triwulan II	72	51,82	71,97
					Triwulan III			
					Triwulan IV			
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	60	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III	60	55,56	92,60
					Triwulan IV			
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	95	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	95	100	105,26
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	10	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	10	10	100
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	2	0	200
		SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	2	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	2	1	50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	45	39	86,67
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	95	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	95	71	74,74
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	85	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	85	100	117,65
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	90	82	91,11

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017, yaitu terdapat 6 sasaran dan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14 indikator telah dicapai sebesar 98,58%. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	70	70	100

Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 70% dan telah dicapai sebesar 70% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD telah dicapai sesuai target yang ditetapkan, dimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru mencapai 70% dari standar penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan, karena pada saat dilakukan revidi atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	95	94,65	99,63

Pencapaian Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 95% dan telah dicapai sebesar 94,65% dengan capaian sebesar 99,63%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja baru sebesar 94,65 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Pencapaian ini didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi

TEPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA, meskipun pada tahun 2017 ini telah terjadi pengurangan/rasionalisasi anggaran pada beberapa SKPD. Namun dari capaian tersebut memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini berdasarkan atas hasil pemeriksaan atas kinerja SPKD yang telah dilaksanakan yaitu dimana masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian penetapan kinerjanya belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	72	61,89	85,96

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 72 skor dan telah dicapai 61,89 skor dengan capaian sebesar 85,96%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72	51,82	71,97

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 72 skor dan telah dicapai 51,82 skor dengan capaian sebesar 71,97%, namun capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 4 Kab/Kota, yaitu : Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kab/Kota telah akan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab/Kota yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	60	55,56	92,60

Pencapaian persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi dari target 60% dan telah dicapai 55,56 % dengan capaian sebesar 92,60%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26

Pencapaian persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 95% dan telah dicapai 100 % dengan capaian sebesar 105,26%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa semua kasus / pengaduan yang masuk sudah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Tertangani dan dilakukan pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat yang masuk disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2017 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	10	10	100

Pencapaian menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dari target 10 kasus dan telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS ini dilakukan upaya-upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0	200

Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari target 2 kasus dan telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan meningkatkan peranan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan/kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50

Pencapaian SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 2 OPD dan telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50%, hal ini menunjukkan bahwa capaian ini belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB.

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	39	86,67

Pencapaian Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 45 orang dan telah dicapai 39 Orang dengan capaian sebesar 86,67%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2017, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 39 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	71	74,74

Pencapaian Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dari target 95% dan telah dicapai 71% dengan capaian sebesar 74,74%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 38 SKPD/OPD dan 9 Biro belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan baru mencapai 71% atau 26 OPD/SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai cakupan pengawasan tersebut, maka pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	85	100	117,65

Pencapaian Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan dari target 85% dan telah dicapai 100%. Hal ini menunjukkan telah dicapai, bahkan diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 18 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Monev

Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90	82	91,11

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari target 90% dan telah dicapai 82% dengan capaian sebesar 91,11%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Terjadi peningkatan pencapaian menjadi WTP
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	50	60	70	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 16,67%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	90	93	94,65	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 1,77%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi peningkatan dan keberhasilan pencapaian yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2015 s.d. 2017. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan atas Opini WTP, disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Analisis pencapaian pada indikator persentase laporan keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terjadi peningkatan dan keberhasilan dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 50%, tahun 2016 sebesar 60% dan tahun 2017 sebesar 70%. Maka dari tahun 2015 s.d. 2017 ini pencapaian dan keberhasilannya mengalami kenaikan sebesar 16,67%. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan pencapaian ini disebabkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian dan keberhasilan ini adalah sudah dilakukan beberapa perbaikan atas temuan dan rekomendasi baik dari Tim Pemeriksaan / BPK-RI dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan yang direviu yaitu antara lain : perbaikan atas salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, perbaikan atas kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, perbaikan atas akun yang belum disajikan dalam Neraca, perbaikan koreksi atas pemusnahan/penghapusan asset lain-lain, perbaikan atas perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan perbaikan atas kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, yaitu terjadi peningkatan pencapai dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 90%, tahun 2016 sebesar 93% dan tahun 2017 sebesar 94,65%, maka pencapaian dan keberhasilan ini mengalami peningkatan sebesar 1,77%. Peningkatan pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah menunjukkan adanya peningkatan dan keberhasilan dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan telah dibentuknya Tim TEPPRA yang melakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem penyerapan anggaran yang berbasis aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPRA. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian ini adalah terus melakukan koordinasi dan peningkatan komitmen dari seluruh Kepala SKPD untuk melaksanakan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai target, jadwal dan dukungan program dan kegiatan, melakukan monitoring melalui aplikasi TEPPRA Kaltim terhadap program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD dan meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat Pimpinan dengan Kepala SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	59,45	66,92	61,89	Terjadi penurunan capaian sebesar -7,52 %
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	0,00	61,44	51,82	Terjadi penurunan capaian sebesar -15,66 %

3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	55,56	60,00	55,56	Terjadi penurunan capaian sebesar -7,40 %
----	--	---	-------	-------	-------	---

- Analisis pencapaian pada indikator skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD, yaitu pada tahun 2015 sebesar 59,45 skor, tahun 2016 sebesar 66,92 skor dan tahun 2017 sebesar 61,89 skor. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar (-7,52%). Terjadinya penurunan pencapaian ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada struktur organisasi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan ini berdampak pada pembubaran OPD dan penggabungan OPD yang ada, hal lain disebabkan belum maksimalnya capaian terhadap 5 (lima) indikator yang menjadi penilaian atas Akuntabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan, sehingga hal ini mengakibatkan terjadi penurunan terhadap capaiannya. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi ini adalah melakukan perbaikan-perbaikan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja / LKjIP yang dibuat, melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi, melakukan koordinasi dan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjutnya dan meningkatkan pengetahuan para Evaluator melalui Bimtek/Diklat dan studi banding agar tercipta persamaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.
- Analisis pencapaian pada indikator skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota, yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,00 skor, karena pada tahun 2015 tidak dilakukan evaluasi, tahun 2016 sebesar 61,44 skor dan tahun 2017 sebesar 51,82 skor. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar (-15,66%). Terjadinya penurunan pencapaian ini

disebabkan adanya penambahan jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi, yaitu pada tahun 2016 ada 3 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2017 menjadi 4 Kab/Kota, yaitu Kab. Berau, Kab. Paser, Kab. Kutai Timur dan Kab. Kutai Barat, sehingga berpengaruh terhadap rata-rata skor hasil evaluasi, hal lain juga disebabkan adanya perubahan template evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB yang berdampak pada skor hasil evaluasi dan hal lain juga disebabkan belum maksimalnya capaian terhadap 5 (lima) indikator yang menjadi penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan, sehingga hal ini mengakibatkan terjadi penurunan terhadap skor capaiannya. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi ini adalah melakukan perbaikan-perbaikan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja / LKJIP yang dibuat, melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi, melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjutnya dan meningkatkan pengetahuan para Evaluator melalui Bimtek/Diklat dan studi banding agar tercipta persamaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 55,56%, tahun 2016 sebesar 60% dan tahun 2017 sebesar 55,56%. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar (-7,40%). Terjadinya penurunan pencapaian ini disebabkan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan, yaitu pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, terdapat terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat

nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, dan meningkatkan pengetahuan Tim Evaluator dalam rangka persamaan persepsi terhadap hasil evaluasi.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	90	100	Terjadi peningkatan capaian sebesar 11,11 %
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	2	15	10	Terjadi penurunan capaian sebesar -33,33%
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	0,00	0,00	0,00	Tidak terjadi perubahan/ tetap
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	2	2	Tidak terjadi perubahan/ tetap.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani, yaitu pada tahun 2015 sebesar 100% , pada tahun 2016 sebesar 90% dan tahun 2017 sebesar 100%. Perbandingan

pencapaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 11,11%. Terjadinya peningkatan pencapaian ini disebabkan, karena penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adanya dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2017 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, terdapat Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran statusnya.

- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai, yaitu pada tahun 2015 terjadi 2 kasus, pada tahun 2016 terjadi 15 kasus dan tahun 2017 terjadi 10 kasus. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar (-33,33%). Terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin pegawai ini menunjukkan adanya trend positif karena kasus pelanggaran disiplin pegawai terjadi penurunan. Penurunan ini disebabkan adanya pengawasan intern yang dilakukan oleh masing-masing Kepala/Atasan pada OPD, meningkatkannya kesadaran pegawai akan pentingnya disiplin pegawai dan adanya penerapan/pemberian sanksi yang tegas terhadap semua pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan. Upaya – upaya yang telah dilakukan antara lain : meningkatkan pengendalian dan pengawasan intern dimasing-masing OPD, meningkatkan kesadaran disiplin pegawai melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran disiplin pegawai.
- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu pada tahun 2015 tidak terjadi kasus KKN, tahun 2016 juga tidak terjadi dan tahun 2017 juga tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadinya kasus KKN ini disebabkan, karena beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsim Kalimantan Timur antara lain : adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu kebijakan tentang

pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli dan adanya inisiatif dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berperan sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga Kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

- Analisis pencapaian pada indikator SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu pada tahun 2015 telah ditetapkan 2 OPD, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan UPTD Laboratorium Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim, pada tahun 2016 ditetapkan 2 RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dan pada tahun 2017 ditetapkan 2 OPD, yaitu RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018 telah ditetapkan OPD sebagai Pilot Project ZI menuju WBK

adalah RSUD AW. Syahrani Samarinda dan RSJD Atma Husada Mahakam, terhadap 2 OPD tersebut sampai saat ini masih dalam tahap evaluasi.

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7= $(6-5)/5*100$
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	32	36	39	Terjadi peningkatan capaian sebesar 8,33%

- Analisis pencapaian pada indikator Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat, yaitu pada tahun 2015 aparatur pengawasan yang bersertifikat 32 orang, tahun 2016 sebanyak 36 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 39 orang Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat. Perbandingan pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 8,33%. Terjadinya peningkatan ini disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	40,38	80	71	Terjadi penurunan sebesar -11,25%
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	88,24	80	100	Terjadi peningkatan sebesar 25%

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai, yaitu pada tahun 2015 cakupan pengawasan sebesar 40,38%, tahun 2016 sebesar 80% dan tahun 2017 sebesar 71%. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan capaian sebesar (-11,25%). Terjadinya penurunan cakupan pengawasan ini disebabkan antara lain bahwa cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 38 SKPD/OPD dan 9 Biro belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan pada tahun 2017 baru mencapai 71% atau 26 OPD/SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan akibat kebijakan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mencapai cakupan pengawasan tersebut, maka pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko atas OPD yang diawasi yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Kegiatan Pengawasan yang Sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 88,24%, tahun 2016 sebesar 80% dan tahun 2017 sebesar 100%. Perbandingan pencapaian ini mengalami peningkatan capaian sebesar 25%. Terjadinya peningkatan capaian ini disebabkan antara lain bahwa semua

Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 18 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia, adanya dukung SDM aparatur pengawasan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan program pengawasan yang telah ditetapkan dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur juga menerapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan/pengawasan berdasarkan audit universe yang sudah dibuat serta disesuaikan dengan besaran anggaran pengawasan yang tersedia. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian ini antara lain, yaitu berkomitmen untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Kebijakan dan Program Pengawasan yang telah ditetapkan, menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan, setiap tahun menetapkan peta auditan/audit universe dalam menentukan kebijakan dan program pengawasan.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	75	85	82	Terjadi penurunan capaian sebesar -3,53%

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 75%, tahun 2016 sebesar 85% dan tahun 2017 sebesar 82%. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan capaian sebesar (-3,53%). Terjadinya penurunan capaian ini disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan, kurangnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya dan belum adanya sanksi yang tegas apabila hasil pengawasan/pemeriksaan tidak ditindaklanjuti oleh Auditan/Obrik dan sampai saat ini masih dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga berpengaruh terhadap hasil capaian tindak lanjutnya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat antara lain adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberikan sanksi yang tegas. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

3. Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018,

bahwa pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 4 indikator sesuai dengan misi 4 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018, yaitu :

- a. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- b. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi.
- c. Jumlah Kasus Yang Berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- d. OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM

Perbandingan pencapaian terhadap 4 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	Tetap pada Opini WTP
2.	Persentase LPPD Kab/Kota Yang Mendapat Nilai Sangat Tinggi	%	60 %	55,56 %	Terjadi Penurunan Capaian sebesar -7,40%
3.	Jumlah Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan.	Kasus	2	0,00	Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN.
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	SKPD	2	1	Terjadi penurunan capaian -50%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi peningkatan dan keberhasilan pencapaian yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2015 s.d. 2017. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan atas Opini WTP, disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka

mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 55,56%, tahun 2016 sebesar 60% dan tahun 2017 sebesar 55,56%. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar (-7,40%). Terjadinya penurunan pencapaian ini disebabkan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan, yaitu pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, terdapat terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda

Kab/Kota, dan meningkatkan pengetahuan Tim Evaluator dalam rangka persamaan persepsi terhadap hasil evaluasi.

- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu pada tahun 2015 s.d. 2017 tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadinya kasus yang berindikasi KKN ini disebabkan, karena beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsim Kalimantan Timur antara lain : adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli dan adanya inisiatif dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berperan sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga Kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
- Analisis pencapaian pada indikator SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu pada tahun 2017, yaitu RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan paad bulan Desember 2017 RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sudah ditetapkan sebagai SKPD/OPD ZI dengan Predikat WBK, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-

RB. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun tahun berikutnya. Pada tahun 2018 telah ditetapkan OPD sebagai Pilot Project ZI menuju WBK adalah RSUD AW. Syahrani Samarinda dan RSJD Atma Husada Mahakam, terhadap 2 OPD tersebut sampai saat ini masih dalam tahap evaluasi dan proses penetapan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2017 telah ditetapkan 6 sasaran, 14 Indikator kinerja dan capaiannya 98,55% yang didukung program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2017. Program dan Kegiatan ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu Program dan Kegiatan Prioritas (utama) dan Program dan Kegiatan Penunjang. Program dan Kegiatan Prioritas itulah yang banyak menunjang tercapainya sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	70	70	100	
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	95	94,66	99,64	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja SKPD

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	72	61,89	85,96	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72	51,82	71,97	
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	60	55,56	92,60	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja SKPD

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	10	10	100	
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0	200	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50	Program Pengembangan Zona Integritas dengan Kegiatan

						Penerapan Zona Integritas pada SKPD.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	39	86,67	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	71	74,74	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	80	100	125	Pengawasan dengan Kegiatan Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	%	95	82	86,32	Program Peningkatan Penyelesaian

	Pengawasan					Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
--	------------	--	--	--	--	---

Berdasarkan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan sangat berperan dalam pencapaian kinerja karena Program dan Kegiatan tersebut telah sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa sasaran dan indikator belum tercapai secara maksimal, namun dukungan program dan kegiatan juga turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaiannya 100% atau diatas 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Berikut disampaikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal seperti anggaran dan dan SDM Aparatur Pengawasan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	100 100	99,24 99,24	0,76 0,76
2.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi	Persentase Penyelesaian Pengaduan	105,26	99,40	5,86

	Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Yang Ditangani			
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	100	99,40	5,86
		Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	100	97,06	2,94
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	105,26	98,03	9,23

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub bag ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk memwujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	365.500.000	362.712.800	99,24
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	70	70	100			
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	95	94,66	99,64	732.350.000	725.026.500	99,00

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	72	61,89	85,96	360.500.000	320.087.950	88,79
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	72	51,82	71,97	300.000.000	266.370.000	88,79
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	60	55,56	92,60	651.250.000	644.737.500	99,00

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	95	100	105,26	230.000.000	228.612.050	99,40
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	10	10	100	110.000.000	109.967.000	99,97
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di	2	0	200	1.175.000.000	1.140.506.700	97,06

	Lingkungan Pemerintah Provinsi						
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	2	1	50	103.300.000	102.707.046	99,43

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	45	39	86,67	70.000.000	69.914.000	99,88
					370.500.000	367.867.764	99,29

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	95	71	74,74	61.000.000	59.799.100	98,03
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	80	100	125			

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95	82	86,32	136.500.000	136.281.650	99,84

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2017 untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 16.945.791.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.945.791.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.289.135.134,00 (92,66%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.898.948.035,00 (97,17%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.166.480.000	1.143.340.586	98,02	Fisik 100%
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.166.480.000	1.143.340.586	98,02	Fisik 100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.800.000	115.433.800	99,68	Fisik 100%
a.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	115.800.000	115.433.800	99,68	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	795.320.000	751.964.854	94,55	Fisik 100%
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	424.820.000	384.097.090	90,41	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370.500.000	367.867.764	99,29	Fisik 100%

4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	76.500.000	76.497.800	100	Fisik 100%
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	76.500.000	76.497.800	100	Fisik 100%
5.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	2.399.600.000	2.377.491.949	99,08	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	365.500.000	362.712.800	99,24	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	1.383.600.000	1.369.772.099	99,00	Fisik 100%
c.	Pemeriksaan Serentak	650.500.000	645.007.050	99,16	Fisik 100%
6.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	660.500.000	586.431.500	88,79	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	660.500.000	586.431.500	88,79	Fisik 100%
7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	136.500.000	136.281.650	99,84	Fisik 100%
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	136.500.000	136.281.650	99,84	Fisik 100%
8.	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	61.000.000	59.799.100	98,03	Fisik 100%
a.	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	61.000.000	59.799.100	98,03	Fisik 100%
9.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	70.000.000	69.914.000	99,88	Fisik 100%
a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	70.000.000	69.914.000	99,88	Fisik 100%
10.	Program Pengembangan Zona Integritas	103.300.000	102.707.046	99,43	Fisik 100%
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	103.300.000	102.707.046	99,43	Fisik 100%
11.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	103.300.000	102.707.046	99,43	Fisik 100%
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	230.000.000	228.612.050	99,40	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	110.000.000	109.967.000	99,97	Fisik 100%
c.	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.175.000.000	1.140.506.700	97,06	Fisik 100%

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2017 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017, yaitu terdapat 6 sasaran dan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14 indikator telah dicapai sebesar 98,58%.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dan langkah-langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam sebagai berikut :

1. ***Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian WTP.***
Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan. Hal lain yang juga yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

2. ***Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan capaian 70%*** kesesuaiannya dengan SAP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi dan menyajikan kesesuaian dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru mencapai 70% dari standar yang ditetapkan, karena pada saat dilakukan revidi atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut dilakukan upaya-upaya perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

dengan melakukan penyelesaian atas rekomendasi – rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan kedepan diharapkan tidak ada lagi temuan yang sifatnya berulang-ulang.

3. ***Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya telah dicapai sebesar 94,65% dengan capaian sebesar 99,63%***, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPRRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPRRA. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian tersebut antara lain melakukan koordinasi dan peningkatan komitmen dari seluruh Kepala SKPD untuk melaksanakan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai target, jadwal dan dukungan program dan kegiatan, melakukan monitoring melalui aplikasi TEPRRA Kaltim terhadap program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD dan meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat Pimpinan dengan Kepala SKPD.

4. ***Skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dicapai 61,89 skor dengan capaian sebesar 85,96%***, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akutabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan. Upaya-upaya yang sudah

dilakukan dalam rangka peningkatan capaian tersebut, antara lain melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, melakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah dibuat sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

5. **Skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dicapai 51,82 skor dengan capaian sebesar 71,97%.** Pada tahun 2017 Evaluasi Akutabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 4 Kab/Kota, yaitu : Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 3 Kab/Kota menjadi 4 Kab/Kota yang dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akutabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, antara lain : melakukan penyelesaian atas tindak lanjut hasil evaluasi, melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pada Evaluator melalui Bimtek/Diklat serta melakukan studi banding kepada Kab/Kota yang sudah mendapat nilai LKjIP yang sangat tinggi.
6. **Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi telah dicapai 55,56 % dengan capaian sebesar 92,60%.** Pada tahun 2017 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak

dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

7. ***Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani telah dicapai 100 % dengan capaian sebesar 105,26%***, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah sudah ditangani sudah dilakukan pemeriksaan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian ini, antara lain dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2017 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk.
8. ***Menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%***, hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera

serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS ini dilakukan upaya-upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS berdasarkan PP 53 Tahun 2010.

9. ***Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%***, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menurunkan kasus yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan peningkatan peran dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
10. ***SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50%***. Pada tahun 2017 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim

Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan pada bulan Desember 2017 telah ditetapkan RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebagai OPD ZI Menuju WBK, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun tahun berikutnya.

11. ***Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat telah dicapai 39 Orang dengan capaian sebesar 86,67%.*** Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

12. **Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya telah dicapai 71% dengan capaian sebesar 74,74%.** Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 38 SKPD/OPD dan 9 Biro belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan baru mencapai 71% atau 26 OPD/SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian cakupan ini, antara lain berkomitmen dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.
13. **Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan telah dicapai 100%.** Pencapaian ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 18 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan

Serentak, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan capaian tersebut, antara lain berkomitmen untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Kebijakan dan Program Pengawasan yang telah ditetapkan, menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan, setiap tahun menetapkan peta auditan/audit universe dalam menentukan kebijakan dan program pengawasan.

14. ***Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah dicapai 82% dengan capaian sebesar 91,11%.*** Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan antara lain meningkatkan kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan memberikan ruang konsultasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

